PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGATTA UTARA
Jl. Jendral Sudirman Nomor 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon 082336863151, Pos-el sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN SANGATTA UTARA TAHUN 2025

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Data ASN/Non ASN meliputi riwayat kesehatan, kondisi aset dan rekening bank, alamat rumah, *password email, user code* dan kondisi keuangan	UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
2	*Private IP Address* , Kode Akses Elektronik, Kode *User* , *Password* dan *Email*	UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan jaringan komunikasi terhadap penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	
3	Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Keuangan *unaudited*	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) dan (j) PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi	Dokumen dapat menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang keliru dan menghambat langkah	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Sampai laporan telah dinyatakan selesai diaudit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	antisipatif dari pemecahan masalah		
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 9	Menghambat proses penegakan hukum dan dapat menimbulkan analisa yang keliru sehingga terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu proses penyusunan kebijakan dan penyelidikan serta penyidikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
5	Dokumen proses pengadaan barang dan jasa	UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (b) dan (h)	Memicu praktek monopoli dan persaingan tidak sehat	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Sampai proses pengadaan telah dinyatakan selesai
6	Notulen rapat yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
7	Data pribadi pemohon pelayanan/masyarakat meliputi NIK, Nomor KK, Nomor Telepon, alamat rumah dll	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	
8	Data kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama serta arsipnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa	Membantu proses penyelesaian sengketa dan penyelidikan serta penyidikan	
9	Data pelapor pengaduan/sengketa	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Menghambat proses penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa	Membantu proses penyelesaian sengketa dan penyelidikan serta penyidikan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10	Dokumen Administrasi Pertanahan dan arsipnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	
11	Data masyarakat pemohon pelayanan pengajuan ijin perkawinan/perceraian dan arsipnya	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	

Sangatta Utara, 16 Juni 2025

Camat Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur,

Hasdiah, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412212001122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara